

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, dengan mengandalkan penerimaan dalam negeri untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu usaha meningkatkan penerimaan dalam negeri agar terwujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber-sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan suatu bangsa harus menerapkan sistem perpajakan yang efektif, sehingga negara dapat mengerahkan sumber daya domestiknya, mendistribusikan kemakmuran dan menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur. Struktur perpajakan yang efektif juga dapat menciptakan insentif untuk memperbaiki pemerintahan, memperkuat saluran-saluran perwakilan politik dan mengurangi korupsi.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, perubahan sistem administrasi perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat terus ditingkatkan. *Self assesment system* menuntut peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi WP juga harus memiliki kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar, menyetorkannya sendiri jika ada pajak terutang ke Bank/Kantor Pos/ dengan *e-Billing* dan melaporkannya sendiri. Namun, kenyataannya masih dijumpai ada semacam penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun secara pasif.

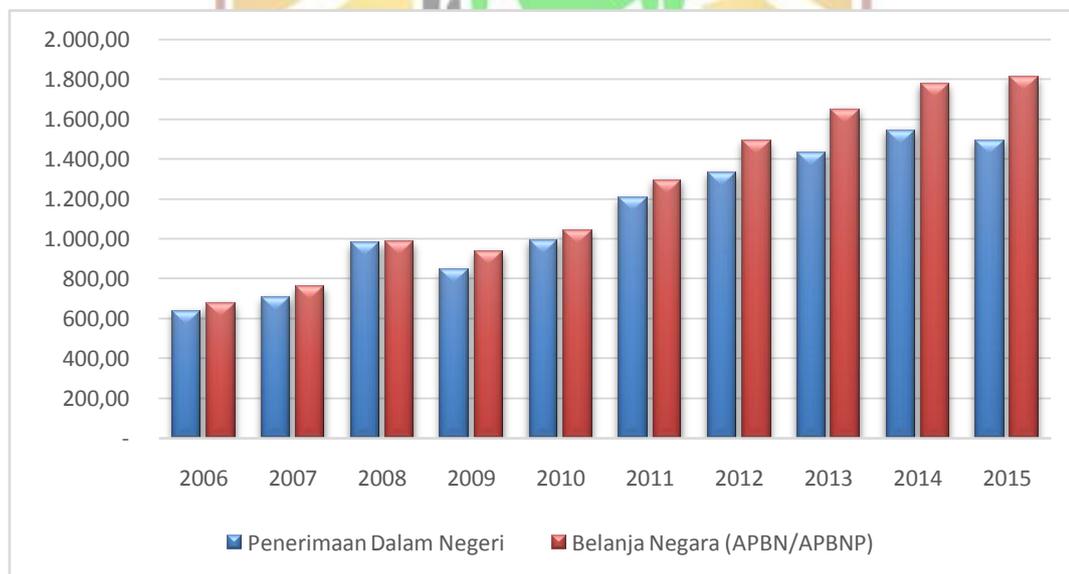
Direktorat Jenderal Pajak (disingkat DJP)adalah salah satu [direktorat jenderal](#) di bawah [Kementerian Keuangan](#) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang [perpajakan](#). Sebagai salah satu institusi penghimpun penerimaan negara, DJP menjadi ujung tombak penyeimbang pengeluaran pemerintah yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Satu dekade terakhir nilai APBN mengalami peningkatan yang sangat besar, total belanja negara yang pada tahun 2006 sebesar Rp. 677.13 triliun, meningkat menjadi Rp 1.810 triliun dalam APBNP tahun 2015, hal ini tentu menuntut penerimaan negara juga harus ditingkatkan.

Mari kita lihat komposisi APBN 10 tahun terakhir pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 1.1 Peranan Penerimaan Dalam Negeri Dalam Belanja Negara Periode 2006 – 2015.

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Belanja Negara	Peranan Penerimaan Dalam Negeri dalam Belanja Negara	Surplus/ Defisit
1	2	3	4 = 2 : 3	5 = (2 : 3)/3
2006	636,15	677,13	93,95%	-6,1%
2007	706,11	757,65	93,20%	-6,8%
2008	979,31	985,99	99,32%	-0,7%
2009	847,10	937,38	90,37%	-9,6%
2010	992,25	1.042,12	95,21%	-4,8%
2011	1.205,35	1.295,00	93,08%	-6,9%
2012	1.332,32	1.491,41	89,33%	-10,7%
2013	1.432,06	1.650,56	86,76%	-13,2%
2014	1.545,46	1.777,18	86,96%	-13,0%
2015	1.491,50	1.810,00	82,40%	-17,6%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan



Grafik 1 Peranan Penerimaan Dalam Negeri Dalam Belanja Negara Periode 2006 – 2015

Untuk diketahui sumber pendapatan negara dalam penyusunan APBN atau APBNP berasal dari :

1. Penerimaan Dalam Negeri

a. Penerimaan Perpajakan (DJP)

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (Non DJP)

2. Penerimaan Hibah

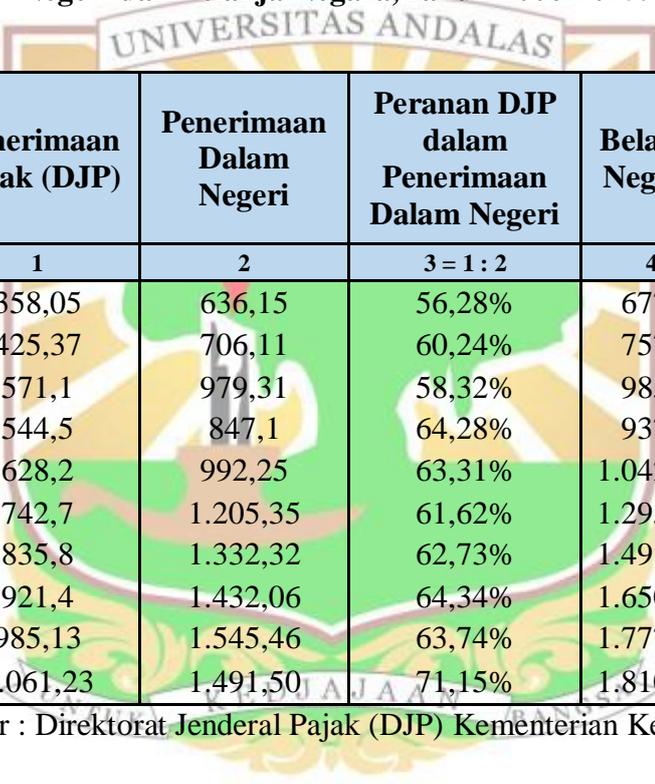
Dari tabel diatas penerimaan dalam negeri harus terus ditingkatkan, DJP sebagai salah satu institusi penghimpun penerimaan dalam negeri dituntut terus melakukan upaya luar biasa guna menggali setiap potensi pajak dalam perekonomian, baik itu berupa kebijakan pajak (*tax policy*) maupun administrasi (*tax administration*). Aspek kebijakan pajak mencakup pemahaman tentang siapa yang dipajaki, apa yang dipajaki, dan berapa besar pajaknya, sedangkan konsep administrasi adalah pemahaman tentang bagaimana cara mewujudkannya.

Dari tabel diatas, menjadi pertanyaan juga bagi kita, ketika porsi belanja negara lebih besar dari pendapatan dalam negeri, dari mana pembiayaannya. Salah satu jawabannya adalah dengan hutang. Berdasarkan data Bank Indonesia update 18 April 2016, total hutang luar negeri (LN) Indonesia menembus angka US\$ 311,48 miliar atau berkisar Rp. 4.125 triliun (Kurs Rupiah 13.246), yang terdiri dari hutang LN sektor publik sebesar US\$ 146.8 miliar atau berkisar Rp. 1.945 triliun, dan hutang LN sektor swasta sebesar US\$ 164.3 miliar atau sekitar Rp. 2.180 triliun.

Pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita akan terus seperti ini, sampai kapan ketika kita tidak mampu membiayai pengeluaran sendiri kita harus bergantung kepada pihak lain?.

Tabel dibawah ini merupakan cerminan penerimaan DJP dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir serta kontribusinya dalam penerimaan dalam negeri.

Tabel 1.2 Peranan Penerimaan Pajak DJP Terhadap Pendapatan Dalam Negeri dan Belanja Negara, Tahun 2006-2015.



Tahun	Penerimaan Pajak (DJP)	Penerimaan Dalam Negeri	Peranan DJP dalam Penerimaan Dalam Negeri	Belanja Negara	Peranan DJP dalam Belanja Negara
	1	2	3 = 1 : 2		4
2006	358,05	636,15	56,28%	677,13	52,88%
2007	425,37	706,11	60,24%	757,65	56,14%
2008	571,1	979,31	58,32%	985,99	57,92%
2009	544,5	847,1	64,28%	937,38	58,09%
2010	628,2	992,25	63,31%	1.042,12	60,28%
2011	742,7	1.205,35	61,62%	1.295,00	57,35%
2012	835,8	1.332,32	62,73%	1.491,41	56,04%
2013	921,4	1.432,06	64,34%	1.650,56	55,82%
2014	985,13	1.545,46	63,74%	1.777,18	55,43%
2015	1.061,23	1.491,50	71,15%	1.810,00	58,63%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan

Seperti berpacu, penerimaan negara dari DJP terus dituntut mengalami peningkatan setiap tahun, untuk mengimbangi pengeluaran pemerintah yang meningkat lebih cepat agar tidak menyebabkan *fiscal gap* atau defisit anggaran melebihi 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara No.17 tahun 2003. Salah satu yang menjadi sorotan akan masih besarnya potensi penerimaan pajak adalah jika dilihat dari penerimaan perpajakan yang tidak berbanding lurus

dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun kita tentu perlu menyikapi ini dengan arif dan adil, tidak melihat dari satu sisi saja. Data BPS (Badan Pusat Statistik) dan DJP menunjukkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir 2006-2015 PDB Indonesia mengalami *fluktuasi* dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% pertahun. Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan dalam periode yang sama dengan rata-rata 5.68% pertahun. Sedangkan target pajak setiap tahun terus mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari PDB maupun pertumbuhan ekonomi nasional, dengan rata-rata pertumbuhan target setiap tahun sebesar 16,1%.

Tabel 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi, PDB, dan Pertumbuhan Target Pajak.

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	PDB	Pertumbuhan Target DJP
2006	5,60%	5,50%	22%
2007	6,30%	6,35%	17%
2008	6,20%	6,01%	24%
2009	4,40%	4,63%	8%
2010	6,10%	6,22%	15%
2011	6,46%	6,49%	33%
2012	6,11%	6,26%	1%
2013	5,78%	5,73%	12%
2014	5,06%	5,06%	12%
2015	4,80%	4,79%	17%
Rata-rata	5,68%	5,70%	16,10%

Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita, anda dan saya berkontribusi dalam membayar pajak untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang merdeka dari ketergantungan hutang. Tabel dibawah ini akan menunjukkan kepada kita berapa jumlah WP terdaftar yang ikut berkontribusi membangun negeri.

Tabel 1.4 Jumlah Wajib Pajak (WP) Terdaftar di DJP.

Tahun	Orang Pribadi (OP)	Badan	Jumlah Wajib Pajak
2006	3.251.753	1.226.279	4.478.032
2007	5.431.689	1.344.552	6.776.241
2008	8.807.666	1.481.924	10.289.590
2009	13.861.253	1.580.287	15.441.540
2010	16.880.649	1.760.108	18.640.757
2011	19.881.684	1.929.507	21.811.191
2012	22.131.323	2.136.014	24.267.337
2013	25.109.959	2.328.509	27.438.468
2014	27.571.471	2.472.632	30.044.103
2015	27.687.515	2.474.086	30.161.601

Dari tabel diatas jumlah WP terdaftar sampai tahun 2015 baru 30.161.601 Wajib Pajak, bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia di tahun yang sama 255.461.700 jiwa, nomor 4 di dunia, dengan jumlah kelas menengah yakni penduduk dengan kekuatan “*expenditure*” per hari antara US\$ 2 – 20 mencapai 170 juta atau $\pm 70\%$ dari jumlah penduduk, jumlah Wajib Pajak terdaftar masih sangat sedikit.

Peningkatan target penerimaan pajak yang sangat drastis, jumlah WP yang masih sangat sedikit menjadi desakan akan perlunya sebuah perubahan yang berkelanjutan, terarah dalam tubuh DJP. DJP tidak lagi dapat bekerja seperti biasa (*business as usual*) dan harus melakukan upaya luar biasa, untuk menggali setiap potensi penerimaan semaksimal mungkin. Reformasi yang berkesinambungan, tata manajemen yang baik di setiap fungsi DJP menjadi sebuah kebutuhan untuk memaksimalkan kinerja DJP.

Without the institution there would be no management, but without management there would be only a mob rather than institution (Druker, 1995 :14).

Mengutip Druker diatas, diperlukan tata manajemen yang baik ditubuh DJP, seperti diperjelas oleh Ricky W.Griffin bahwa manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi penerimaan perpajakan, sehingga dalam menyusun asumsi target bisa lebih realistik, walaupun wewenang penetapan target saat ini berada di Menteri Keuangan yang mengakomodir seluruh belanja pemerintah.

Sebagai wujud keseriusan dan komitmen DJP sebagai pioner dalam reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan tata manajemen yang baik, terencana, terorganisasi, berkoordinasi dan terkontrol guna memaksimalkan kinerja DJP yang tertuang dalam *Blue Print* dan rencana strategis DJP, salah satunya adalah dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *Account Representative (AR)*.

Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomatisasi kantor serta berbagai

pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayer's Account*, *e-Registration*, *e-Counseling* dan yang terbaru aplikasi *e-Faktur*. Melalui reformasi ini diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif ditunjang dengan adanya penerapan kode etik pegawai DJP yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut *IBFD Handbook on Tax Administration*, pengelolaan administrasi perpajakan mencakup penentuan visi, penentuan rencana strategis dan tujuan operasional, manajemen resiko, manajemen operasional dan manajemen kinerja, serta manajemen terhadap proses-proses lainnya yang mendukung sebuah sistem pajak beroperasi dengan efektif dan efisien. Bagi DJP, peranan sebagai sebuah *tax administrator* tersebut dirumuskan dalam tiga fungsi utama DJP yaitu:

1. Fungsi Pelayanan, yang mencakup bagaimana DJP menyediakan layanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah bagi Wajib Pajak (WP);
2. Fungsi Pengawasan yang memastikan bahwa semua WP memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku;
3. Fungsi Penegakan Hukum yang memastikan bahwa ketentuan pajak diterapkan dengan adil bagi semua WP, sanksi diterapkan untuk pelanggar, dan sebuah sistem deteksi ketidakpatuhan berjalan.

Ketiga fungsi utama DJP tersebut melekat pada tugas dan tanggungjawab seorang *Account Representative (AR)*, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang *Account*

Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern.

Dari uraian diatas penulis membahas masalah ini menjadi sebuah penelitian yang diberi judul "PENGARUH PENAMBAHAN JUMLAH WAJIB PAJAK (WP) TERHADAP PENCAPAIAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) DALAM MENGHIMPUN PAJAK YANG DIMODERASI REFORMASI DJP ".

1.2. Rumusan Masalah.

Dengan memperhatikan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan serta untuk fokusnya penelitian, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun pajak?.
2. Apakah ada pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun pajak?.
3. Apakah penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terpengaruh dengan adanya reformasi DJP sehingga mempengaruhi pencapaian DJP dalam menghimpun pajak?.
4. Apakah penambahan jumlah Wajib Pajak Badan terpengaruh dengan adanya reformasi DJP sehingga mempengaruhi pencapaian DJP dalam menghimpun pajak?.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada kita semua putra dan putri negeri tercinta ini, dari mana, dengan apa pembiayaan negara kita tercinta ini, sekaligus ingin mengetuk jiwa Nasionalisme kita semua, bahwa dengan jumlah Rakyat Indonesia yang begitu besar, nomor 4 didunia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 berjumlah lebih dari 255.461.700 jiwa, sebenarnya kita mampu, kita sanggup membiayai Negeri kita sendiri, tanpa hutang. Untuk itu penulis akan mencoba membagi tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak yang dimoderasi Reformasi DJP.
4. Untuk menganalisis pengaruh penambahan jumlah Wajib Pajak Badan terhadap pencapaian DJP dalam menghimpun penerimaan negara dari pajak yang dimoderasi Reformasi DJP.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi DJP untuk lebih memahami dan focus memperluas basis pajak karna berpengaruh dalam

pencapaian target penerimaan pajak, dengan harapan DJP dapat menghadirkan solusi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan baik bagi Pemerintah, DJP, dan stakeholder (Rakyat Indonesia) untuk terus mendukung reformasi birokrasi di tubuh DJP hingga terwujud Badan Perpajakan yang Perform yang mampu mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal pembiayaan negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menentukan arah kebijakan terkait otoritas perpajakan dalam menghimpun pajak untuk kemandirian nasional serta menyampaikan akan pentingnya sinergi seluruh Kementerian dan Lembaga terkait demi tercapainya target penerimaan nasional khususnya penerimaan pajak DJP.
4. Untuk menambah wawasan, baik penulis sendiri, maupun pemerhati pajak terutama didalam menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.
5. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis ini dan agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah :

- a. Penelitian ini hanya membahas penerimaan dalam negeri yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

- b. Penelitian ini membahas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.
- c. Penelitian ini hanya membahas pengaruh pembentukan unit khusus yang diberi nama *Account Representative (AR)* sebagai salah satu wujud dan poin penting dari Reformasi DJP untuk dapat secara langsung berperan dalam memperluas basis pajak.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini diuraikan dalam 5 bab dan masing-masing bab akan dirinci ke dalam subbab sesuai dengan kebutuhan penjelasannya. Secara garis besar penulisan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Kerangka teori digunakan sebagai teori dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pengolahan data, analisa dan rekomendasi yang akan diberikan terhadap permasalahan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan gambaran tentang metode untuk menyelesaikan permasalahan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, membahas hubungan antara Penambahan Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan DJP yang dimoderatori Reformasi DJP, dan implikasi penelitian serta rekomendasi untuk *stakeholder*, DJP dan Pemerintah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

